



LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

A. Pendahuluan

Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen, yang menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Tidak sebatas informasi finansial saja tetapi juga informasi non finansial.



Langenderfer (1973) dalam glynn j. J. (1973) menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :

- 1. Sifat informasi yang diberikan.**
- 2. Pihak yang menerima atau memakai informasi.**
- 3. Tujuan informasi diberikan.**

Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi :

- 1. Laporan realisasi anggaran.**
- 2. Laporan arus kas.**
- 3. Neraca.**
- 4. Catatan atas laporan keuangan.**



Beberapa alasan pembuatan laporan keuangan :

- 1. Dari sisi internal : alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.**
- 2. Dari sisi eksternal : mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.**
- 3. Tujuan informasi diberikan.**



TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)
2. Akuntabilitas dan pelaporan restrospektif (*accountability and restrospective reporting*).
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*).
4. Kelangsungan organisasi (*viability*).
5. Hubungan masyarakat (*public relation*).
6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)



Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah :

- 1. Memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).**
- 2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.**

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.



Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk :

- 1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan.**
- 2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi.**
- 3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.**
- 4. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.**



Laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan.

Tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah :

- 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.**
- 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.**



3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.

Kinerja manajerial dan organisasi

Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba.

Pemerintah bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik.



TUJUAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4

Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut *statement of financial accounting concepts no 4 (sfac 4)*.

- **Bermanfaat bagi penyusunan keputusan yang rasional.**
- **Untuk menilai pelayanan.**
- **Menilai kinerja manajer organisasi.**
- **Memberi informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan.**
- **Informasi kinerja selama satu periode.**
- **Informasi cara memperoleh dan membelanjakan kas.**
- **Memberi penjelasan dan interpretasi.**



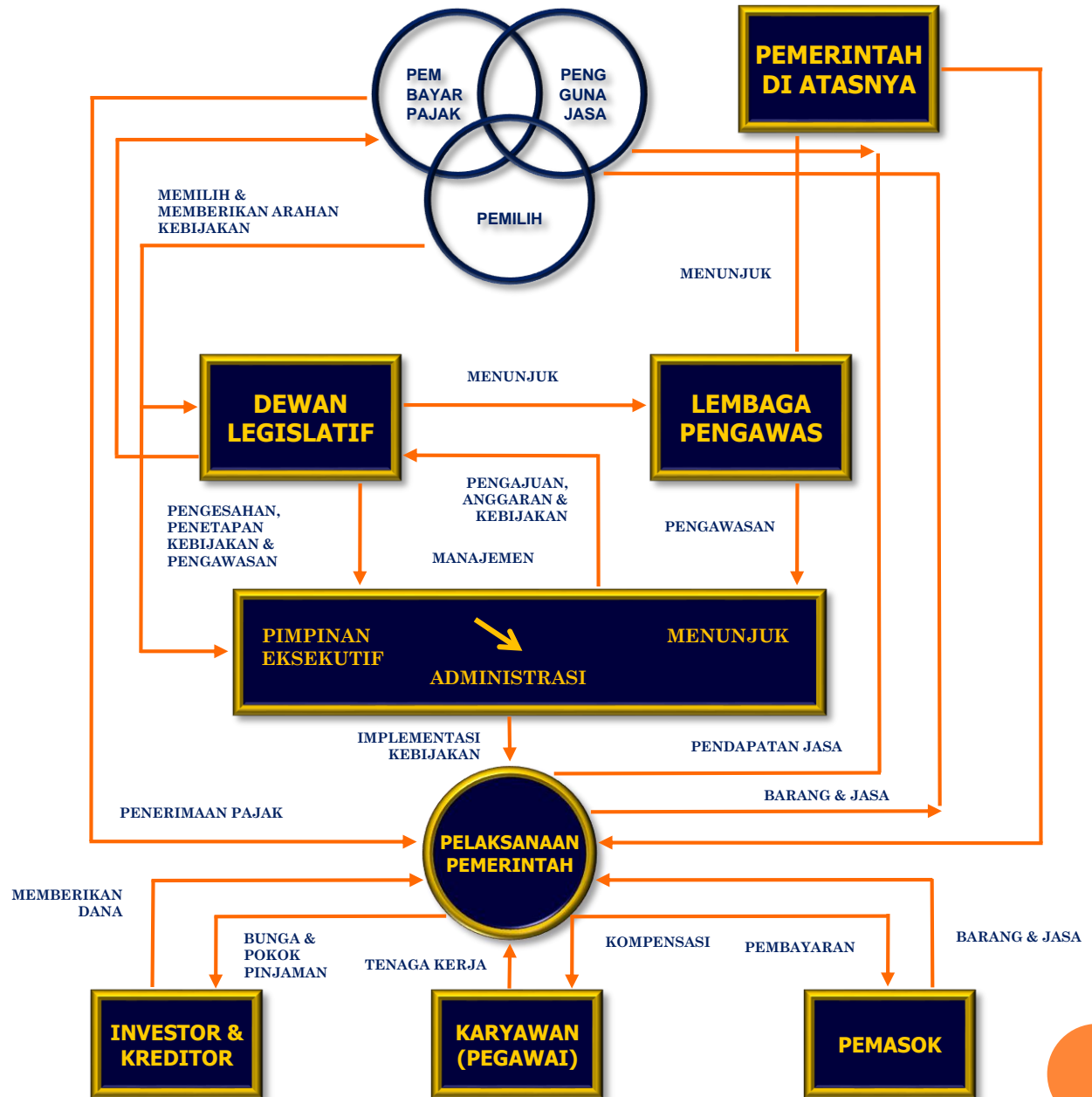
PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN KEPENTINGANNYA

Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat **10** (sepuluh) kelompok pemakai laporan keuangan.

- 1. Pembayar pajak (*taxpayers*).**
- 2. Pemberi dana bantuan (*grantors*).**
- 3. Investor.**
- 4. Pengguna jasa (*fee-paying service recipients*).**
- 5. Karyawan/pegawai.**
- 6. Pemasok (*vendor*).**
- 7. Dewan legislatif.**
- 8. Manajemen.**
- 9. Pemilih (*voters*).**
- 10. Badan pengawas.**



PEMAKAI POTENSIAL LAPORAN KEUANGAN & KETERKAITANNYA



Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu :

- 1. Lembaga pemerintah (*governing bodies*).**
- 2. Investor dan kreditor.**
- 3. Pemberi sumber daya (*resource providers*).**
- 4. Badan pengawas (*oversight bodies*).**
- 5. Konstituen.**



Hanley et. A (1992) mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 12 (dua belas) kelompok, yaitu :

- 1. Anggota terpilih (*elected members*).**
- 2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak.**
- 3. Pelanggan atau klien.**
- 4. Karyawan/pegawai.**
- 5. Pelanggan dan pemasok.**
- 6. Pemerintah.**
- 7. Pesaing (*competitors*).**
- 8. *Regulator*.**
- 9. Pemberi pinjaman.**
- 10. Donor dan sponsor. Anggota terpilih (*selected members*).**
- 11. Investor atau partner bisnis.**
- 12. Kelompok penekan lainnya.**



Borgonovi (1992) dan anessi-pessina (1997) mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 11 (sebelas) kelompok, yaitu :

1. Masyarakat pengguna jas publik.
2. Masyarakat pembayar pajak.
3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi.
4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah.
5. Badan-badan interbasional, seperti bank dunia, imf, adb, pbb dsb.
6. Investor asing.
7. Generasi yang akan datang.
8. Lembaga negara.
9. Kelompok politik (*partai politik*)
10. Manajer publik (gubernus, buapti, direktur bumh/bumd.
11. Pegawai pemerintah.



- **Serikat dagang sektor publik mengidentifikasi pemakai laporan pemerintah menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :**
 - 1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab.**
 - 2. Legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat.**
 - 3. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/atau berpartisipasi dalam proses pemberi pinjaman.**



HAK DAN KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN

Pada dasar masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :


1. Hak untuk mengetahui (*right to know*), yaitu
 - A. Mengetahui kebijakan pemerintah.
 - B. Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah.
 - C. Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.
2. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).
3. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi Penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.



Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai (*general purposive*), meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda.



Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah :

- 1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga dan kualitas pelayanan yang diberikan.**
 - 2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan.**
 - 3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.**
 - 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi Pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara**
 - 5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.**
 - 6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.**
- 

PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN SEKTOR SWASTA

PERBEDAAN	
LAPORAN DEPARTEMEN PEMERINTAH	LAPORAN KEUANGAN SEKTOR SWASTA
FOKUS FINANSIAL & POLITIK	FOKUS FINANSIAL
KINERJA DIUKUR SECARA FINANSIAL & NON FINANSIAL	SEBAGIAN BESAR KINERJA DIUKUR SECARA FINANSIAL
PERTANGGUNGJAWABAN KPD PARLEMEN & MASY LUAS	PERTANGGUNGJAWABAN KPD PEMAGANG SAHAM & KREDITUR
BERFOKUS PADA BAGIAN ORGANISASI	BERFOKUS PADA ORGANISASI SECARA KESELURUHAN
MELIHAT KE MASA DEPAN SECARA DETAIL	TIDAK DPT MELIHAT MASA DEPAN SECARA DETAIL
ATURAN PELAPORAN DITENTUKAN OLEH DEPARTEMEN KEUANGAN	ATURAN PELAPORAN DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG STANDAR AKUNTANSI, PASAR MODAL, & PRAKTIK AKUNTANSI
LAPORAN DIPERIKSA OLEH TREASURY	LAPORAN KEUANGAN DIPERIKSA OLEH AUDITOR INDEPENDEN
<i>CASH ACCOUNTING</i>	<i>ACCRUAL ACCOUNTING</i>
PERSAMAAN	
DOKUMEN-DOKUMEN SUMBER	
BERPERAN SEBAGAI HUBUNGAN MASYARAKAT (<i>PUBLIC RELATION</i>)	


Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain :

- 1. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik (pemerintah).**
- 2. Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya resiko investasi.**
- 3. Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.**
- 4. Kualitas keputusan menjadi buruk.**
- 5. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual.**



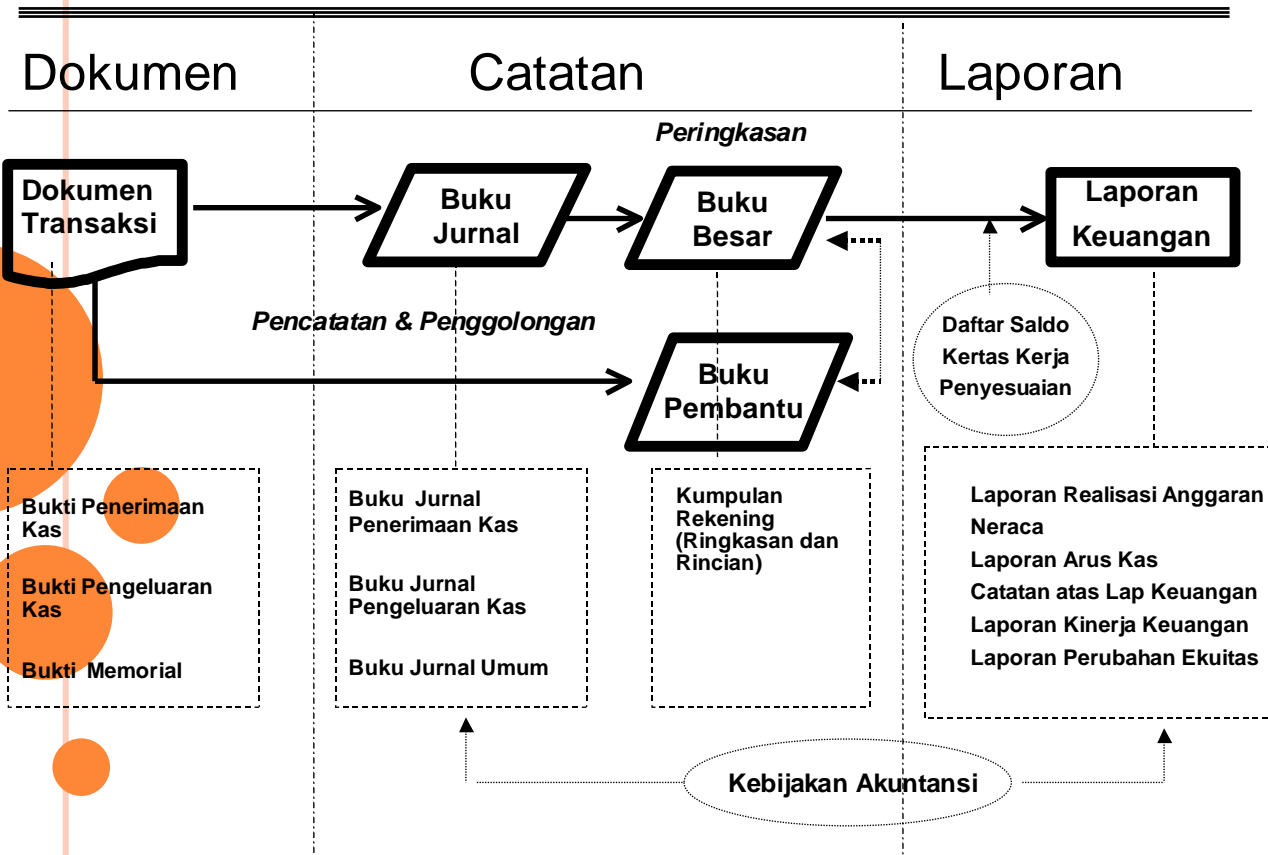
LUAS PENGUNGKAPAN (*DISCLSURE*) YANG DIPERLUKAN

Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan.**
 - 2. Kebijakan menghapuskan/menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas.**
 - 3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva-aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya.**
 - 4. Deskripsi mengenai transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas.**
 - 5. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non operasi.**
 - 6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan (*notes*) laporan keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas.**
- 

SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Siklus Akuntansi



BUKTI TRANSAKSI

Contoh dari bukti yaitu :

Kas	: Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM)
Piutang	: Daftar Piutang
Persediaan	: BA Penerimaan Barang, Daftar Persediaan
Aktiva Tetap	: BA Penerimaan Inventaris, Daftar Aktiva
Hutang	: Surat Perjanjian (Akad Kredit), Dokumen penarikan Pinjaman
Pendapatan	: Surat Tanda Setoran (STS), Daftar Pembukuan Administratif (DPA)
Belanja	: Surat Perintah Membayar (SPM), Daftar Pembukuan Administratif (DPA)

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal

LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.



LAPORAN KINERJA KEUANGAN

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan tersebut disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya



TERIMA KASIH

